

DAMPAK KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SUBSIDI PUPUK TERHADAP KINERJA USAHATANI DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HARGA DASAR GABAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RR. Retno Widowati, Emilya, Hamsudin¹⁾ dan Dewa K.S. Swastika²⁾

¹⁾Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Jl. K.H. Wahid Hasyim, Sempaja PO Box 1237 Samarinda

²⁾Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Jl. A. Yani 70 Bogor

ABSTRACT

Although share of agricultural sector in GRDP of East Kalimantan province is relatively small, but this sector employs significant labor. On the other hand, agricultural land resources are less utilized optimally. Results of the study showed that 89 percent of sample farmers reduced the dosage of fertilizers due to too expensive. The farmers (55%) did not difficulty in purchasing, but the price was unaffordable. Most of the farmers (96%) deemed that rice price at farm level was too low. Negative impact of high price of fertilizers led farmers to use less SP-36 and it resulted in lower average yields by 0.1 ton/ha. Real income of farmers from rice farming was relatively low due to ineffective implementation of floor price policy to compensate increased price of fertilizers. It is essential to maintain floor price of rice officially established by the government. For example, the government purchases farmers' rice through Dolog. The local government could also intervene through credit program for input purchase at low interest rate.

Key words: *fertilizer subsidy, rice farming, floor price*

ABSTRAK

Walaupun peran sektor pertanian dalam PDRB di Kalimantan Timur relatif kecil, tetapi cukup banyak menyerap tenaga kerja. Dipihak lain, sumberdaya lahan masih relatif sedikit dimanfaatkan secara optimal. tercatat cukup luas, yaitu 856.195 ha lahan sawah potensial, sementara yang baru termanfaatkan baru Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pupuk relatif mahal bagi 89 persen petani sampel sehingga mengurangi aplikasi pupuk dan menurunkan produktivitas. Sekitar 55 persen petani tidak kesulitan memperoleh pupuk di kios sarana produksi, namun harga pupuk terlalu tinggi. Sebanyak 96 persen petani menyatakan bahwa harga gabah antara Rp 900 sampai Rp 1.100 per kg tidak sebanding dengan biaya produksi. Sebagian besar (57%) tidak lagi mengandalkan lahan pertaniannya sebagai mata pencaharian utama. Untuk meningkatkan kemampuan petani membeli sarana produksi, maka pemerintah harus berupaya menyediakan fasilitas kredit murah dengan prosedur administrasi yang mudah. Pencabutan subsidi pupuk secara umum tidak berdampak negatif terhadap tingkat penerapan teknologi, kecuali berkurangnya penggunaan SP36 yang berakibat penurunan produktivitas padi sekitar 1 ku/ha. Dampak negatif yang cukup signifikan dari penghapusan subsidi ini adalah menurunnya pendapatan riil usahatani padi yang terutama disebabkan oleh tidak efektifnya implementasi kebijakan harga dasar gabah. Untuk melindungi petani dari kerugian akibat kebijakan penghapusan subsidi, maka perlu ada upaya pengamanan kebijakan harga dasar gabah, berupa pembelian gabah petani oleh Dolog melalui KUD atau melalui Tim Khusus Dolog. Alternatif lain adalah bantuan subsidi pupuk oleh pemerintah daerah kepada petani di Kalimantan Timur.

Kata kunci : *subsidi pupuk, usahatani padi, harga dasar gabah*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian di Kalimantan Timur masih diharapkan menjadi salah satu sektor

andalan, meskipun perannya dalam menyumbang PDRB nonmigas hanya sekitar 16,93 persen. Saat ini sektor pertanian masih menyerap sekitar 36,61 persen tenaga kerja dengan laju pertumbuhan 3,64 persen (Bappeda, 2002). Apabila

Dampak Kebijakan Penghapusan Subsidi Pupuk Terhadap Kinerja Usahatani dan Efektivitas Kebijakan Harga Dasar Gabah di Provinsi Kalimantan Timur (RR. Retno Widowati, Emilya, Hamsudin, dan Dewa K.S. Swastika))

dirinci menurut komoditas, sumber pertumbuhan yang paling potensial adalah beras. Karena permintaan komoditas ini di Kalimantan Timur rata-rata sebesar 275.329 ton/tahun, sementara tingkat penyediaan 232.531 ton/tahun atau terdapat kekurangan sebesar 42.799 ton/tahun (Distan, 2001). Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa dari lahan sawah seluas 856.195 ha, baru seluas 97.983 ha yang telah dimanfaatkan. Kendala utama yang diduga menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan lahan adalah keterbatasan tenaga kerja dan modal.

Hasil pengamatan di lapangan pada tahun 2001 menunjukkan bahwa produktivitas padi sawah di Kabupaten Bulungan, Berau, dan Kutai Kertanegara masing-masing sebesar 3,23 ton/ha, 3,37 ton/ha, dan 3,90 ton/ha. Rendahnya tingkat produktivitas disebabkan masih rendahnya tingkat penerapan teknologi terutama penggunaan pupuk. Dari hasil prasarvei diketahui bahwa dari 40 petani responden, persentase yang tidak menggunakan pupuk urea 9,5 persen, KCl 52,4 persen, dan SP36 76,2 persen.

Banyaknya petani yang tidak menggunakan pupuk diduga karena mahalnya harga pupuk setelah subsidinya dicabut, dan rendahnya harga gabah di tingkat petani. Mulai Desember 1998 pemerintah mencabut subsidi pupuk, sehingga harga Urea naik dari Rp 450/kg menjadi Rp 1.115/kg; SP-36 naik dari Rp 675/kg menjadi Rp 1.600/kg; KCl naik dari Rp 850/kg menjadi Rp 1.650/kg, dan ZA naik dari Rp 506/kg menjadi Rp 1.000/kg (Deptan, 1998; Swastika *et al.*, 1999b).

Sebagai kompensasi dari pencabutan subsidi pupuk, maka pemerintah menaikkan harga dasar gabah kering giling (GKG) dari Rp. 1.000/kg menjadi Rp 1.500/kg (Swastika *et al.*, 1999a). Kenaikan harga pupuk langsung ditanggung oleh petani, sehingga menyebabkan kenaikan biaya produksi. Sebaliknya, kenaikan harga dasar gabah belum tentu dinikmati oleh petani, karena harga gabah aktual di tingkat petani masih jauh di bawah harga dasar. Petani melaporkan bahwa sejak tahun 1999 sampai 2001, harga

GKG hanya berkisar antara Rp 850 sampai Rp 1.100 per kg, sedangkan harga pupuk tetap tinggi dan tidak pernah di bawah HET.

Dalam tahun anggaran 2002, BPTP Kalimantan Timur melakukan studi Dampak Kebijakan Penghapusan Subsidi Pupuk Terhadap Penerapan Teknologi, Produksi dan Pendapatan Serta Efektivitas Kebijakan Harga Gabah di Kalimantan Timur. Sesuai dengan salah satu mandat yang diemban oleh BPTP Kalimantan Timur yaitu membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanian, maka studi ini ditujukan untuk memahami permasalahan daerah, mengkaji kebijakan pemerintah pusat yang berdampak di daerah dan merumuskan alternatif kebijakan dalam mendukung maupun memperbaiki kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di Kalimantan Timur.

Atas dasar pertimbangan di atas, dan mengingat bahwa kebijakan penghapusan subsidi pupuk tampaknya tak mungkin dicabut kembali, maka pemerintah daerah perlu mengupayakan agar dampak negatif dari penghapusan subsidi pupuk dapat diminimalkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan studi untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan penghapusan subsidi pupuk terhadap penerapan teknologi, produksi dan pendapatan petani serta bagaimana efektivitas kebijakan penetapan harga dasar gabah di tingkat petani setelah kebijakan ini berlangsung selama beberapa tahun.

Tujuan dari pengkajian ini adalah : (1) Untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh kebijakan penghapusan subsidi pupuk terhadap produksi dan pendapatan petani; (2) Mengevaluasi efektivitas kebijakan harga dasar gabah di tingkat petani; dan (3) Merekomendasikan alternatif kebijakan tentang subsidi pupuk dan pelaksanaan kebijakan harga dasar gabah.

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah informasi tentang pengaruh penghapusan subsidi pupuk terhadap tingkat penerapan teknologi, produksi dan pendapatan petani padi. Luaran lainnya adalah informasi tentang efektivitas

tas pelaksanaan kebijakan kenaikan harga dasar gabah di tingkat petani.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Penghapusan subsidi pupuk dan penetapan harga dasar gabah telah berlangsung hampir empat tahun sejak ditetapkan oleh pemerintah Desember 1998. Tujuan dari penghapusan subsidi pupuk adalah : (1) mengurangi beban anggaran pembangunan; (2) menghilangkan perbedaan harga pupuk antara subsektor (tanaman pangan dan perkebunan); dan (3) menghilangkan perbedaan harga yang signifikan antara harga dalam negeri dengan harga di pasar internasional (Swastika *et al.*, 1999a). Untuk mengkompensasi penghapusan subsidi pupuk tersebut, pemerintah menaikkan harga dasar GKG dari Rp. 1.000/kg menjadi Rp. 1.500/kg.

Masalah yang muncul dari kebijakan di atas ialah bahwa kenaikan harga pupuk menyebabkan kenaikan biaya produksi sedangkan harga gabah yang berlaku di tingkat petani jauh di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini dapat menyebabkan petani tidak mampu membeli pupuk sehingga dapat menurunkan produktivitas yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan petani.

Mengingat bahwa kebijakan penghapusan subsidi pupuk tampaknya tak mungkin dicabut kembali, maka pemerintah daerah perlu mengupayakan agar dampak negatif dari penghapusan subsidi pupuk dapat dikurangi. Di samping itu, kebijakan kenaikan harga gabah memerlukan langkah pengamanan, agar tingkat harga aktual yang diterima petani sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian Swastika *et al.*, (1999a) menunjukkan bahwa respon petani di Jawa Timur dan Jawa Barat terhadap penghapusan subsidi pupuk adalah positif selama pemerintah mampu mengamankan harga dasar gabah pada tingkat yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, di Provinsi Kalimantan Timur

telah diadakan studi dampak kebijakan penghapusan subsidi pupuk terhadap tingkat penerapan teknologi (pemupukan), produksi dan pendapatan petani, serta efektivitas kebijakan penetapan harga gabah di tingkat petani.

Lokasi Penelitian

Survei dilaksanakan di tiga kabupaten sentra produksi padi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Bulungan, Berau, dan Kutai Kertanegara. Dari kabupaten terpilih, ditetapkan secara *purposive* kecamatan yang memiliki luas panen dan produksi tertinggi. Dari kecamatan, kemudian dipilih desa yang juga memiliki luas lahan dan tingkat produksi tertinggi.

Pada Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Palas ditetapkan sebagai kecamatan sampel dengan luas panen terluas 1.241 ha. Sementara itu di Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai kecamatan sampel dengan luas panen terluas 10.563 ha. Pada masing-masing kecamatan ditetapkan desa yang memiliki luas panen dan produksi yang tinggi atau merupakan kawasan sentra pengembangan komoditas padi.

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan TK II Tanjung Redeb, diketahui bahwa Kecamatan Gunung Tabur merupakan sentra produksi padi di Kabupaten Berau dengan luas panen terluas 707 ha. Pada TA 1999/2000 kecamatan ini dipecah menjadi dua yaitu Kecamatan Gunung Tabur dan Teluk Bayur. Pada penelitian ini, atas saran dari kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan TK II, Kecamatan Teluk Bayur dipilih sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil survei awal dan data sekunder maka Desa Lebanan Jaya yang terdapat di Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Desa Tanjung Selor Hilir dan Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan Desa Separi Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai desa sampel. Dengan demikian, terpilih

empat desa sebagai sampel. Pada masing-masing desa ditetapkan 20-30 orang petani responden.

Jenis dan Prosedur Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, seperti Dinas Pertanian TK II, BPS, PT. Pusri atau PT. Pupuk Kalimantan Timur dan agen penyalurnya, Bulog, Deperindag, PPL dan instansi lain. Jenis data yang dikumpulkan diantaranya adalah Program Pengembangan Pertanian di tiap kabupaten, luas lahan potensial, tingkat penerapan teknologi termasuk rekomendasi pemupukan serta data kebutuhan dan distribusi pupuk, data harga dasar gabah, kebutuhan pengadaan pangan dan lainnya.

Data primer diperoleh dari petani dan pedagang serta penyalur pupuk yang terdapat di desa terpilih. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data penggunaan input dan perolehan output, data harga input dan output, distribusi penyaluran input (pupuk) dan output, serta permasalahan yang dihadapi petani.

Metode Analisis

Data dan informasi kualitatif disajikan secara deskriptif informatif dalam bentuk tabel dan gambar, sedangkan untuk data finansial dianalisis dengan menggunakan analisis budget parsial. Untuk mengetahui dampak penghapusan subsidi pupuk, maka analisis dilakukan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah ditetapkannya penghapusan subsidi pupuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kabupaten Kutai Kertanegara memiliki luas lahan sawah 79.702 ha dengan komposisi terluas adalah lahan sawah tadah hujan seluas 64.298 ha atau sekitar 80.67 persen dari luas

sawah (Distan Kutai, 2001). Demikian juga Kabupaten Berau memiliki luas lahan potensial 185.042 ha yang terdiri dari lahan sawah 32.375 ha dan lahan kering 152.667 ha. Di antara lahan potensial tersebut yang baru dimanfaatkan seluas 21.298 ha atau 11.51 persen (Distan Berau, 2001). Kabupaten Bulungan mempunyai lahan potensial seluas 72.585 ha dan yang dimanfaatkan baru 11.355 ha (15.65%), dengan peruntukan lahan sawah sebesar 8.850 ha (Distan Bulungan, 2001).

Pada saat ini, pemerintah daerah sedang mengusahakan pompanisasi pada lahan sawah tadah hujan. Hal ini dimaksudkan agar petani dapat lebih intensif dalam melaksanakan kegiatan usahatani. Pada umumnya petani di daerah penelitian sangat memerlukan bimbingan secara teknis, karena masih banyak petani yang mengusahakan lahannya secara sederhana tanpa olah tanah atau dengan cara membakar, sementara itu kesuburan lahan mulai berkurang, serta keadaan iklim yang tidak menentu menambah masalah bagi petani. Petani tidak dapat mengusahakan lahan usahanya 2 atau 3 kali per tahun. Hal ini disebabkan masih banyaknya hama dan penyakit tanaman. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bulungan, petani hanya mengusahakan lahan sawah pada saat menjelang musim penghujan datang dan setelah itu bera. Petani tidak berani mengusahakan lahan pertanian karena berkembangnya hama burung. Namun petani masih dapat memanfaatkan lahan berbukit untuk menanam padi gogo (varietas lokal), yang dipercaya lebih tahan terhadap hama dan penyakit serta kekeringan. Namun produktivitas padi gogo masih rendah.

Luas panen padi di Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 1996-2000 mengalami penurunan dari 157.866 ha pada tahun 1996 menjadi 138.348 ha pada tahun 2000, atau menurun rata-rata 3,25 persen/tahun. Namun demikian, produktivitas padi meningkat dari rata-rata 2,56 ton/ha pada tahun 1996 menjadi 2,91 ton/ha pada tahun 2000, atau meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 2,90 persen/tahun. Dengan

demikian, produksi padi menurun dengan pertumbuhan rata-rata 0,43 persen/tahun.

Demikian pula halnya dengan dua kabupaten sampel. Selama lima tahun terakhir, luas panen padi di Kabupaten Bulungan menurun dari 15.644 ha pada tahun 1996 menjadi 9.035 ha tahun 2001, atau menurun dengan laju pertumbuhan rata-rata -10,40 persen/tahun. Produktivitas padi masih meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,84 persen/tahun, sehingga produksi menurun dengan pertumbuhan rata-rata -8,77 persen/tahun.

Di Kabupaten Kutai Kertanegara, penurunan luas areal panen lebih tajam lagi. Selama periode 1996-2001, luas panen padi menurun dari 88.213 ha pada tahun 1996 menjadi 42.088 ha pada tahun 2001, atau turun dengan pertumbuhan rata-rata -13,76 persen/tahun. Sebaliknya, produktivitas padi meningkat rata-rata 7,84 persen/tahun, yaitu dari 2,99 ton/ha pada tahun 1996 menjadi 4,36 ton/ha tahun 2001. Dengan demikian, produksi padi menurun dengan pertumbuhan rata-rata -6,96 persen/tahun.

Penurunan luas panen padi diduga karena makin berkurangnya minat petani untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu, kemarau panjang dan kebakaran hutan menyebabkan banyak ladang yang baru ditanami menjadi kering dan ikut terbakar, sehingga sulit bagi petani untuk memulai kembali kegiatan usahatani.

Berbeda dengan dua Kabupaten Bulungan dan Kutai Kertanegara, luas panen padi di Kabupaten Berau justru meningkat tajam dari 1.846 ha pada tahun 1996 menjadi 8.765 ha tahun 2001, atau tumbuh rata-rata 36,55 persen/tahun. Sebaliknya, produktivitas padi menurun dari 3,09 ton/ha pada tahun 1996 menjadi 2,69 ton/ha tahun 2001, atau menurun dengan pertumbuhan rata-rata -2,73 persen/tahun. Dengan demikian, produksi padi di kabupaten ini meningkat rata-rata 32,82 persen/tahun. Meskipun luas panen dan produksi meningkat, namun pangsaanya terhadap luas dan produksi Provinsi Kalimantan

Timur cukup kecil, sehingga tidak mampu membuat pertumbuhan produksi padi Kalimantan Timur menjadi positif. Secara lebih rinci, perkembangan luas areal dan produksi padi di tiga kabupaten sampel dan Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada Tabel 1.

Tingkat Kecukupan Beras

Tingkat konsumsi dan pengadaan beras di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel 2.

Dengan tingkat produksi 401.955 ton dan jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 2 juta jiwa dengan tingkat konsumsi per kapita 113 kg per orang, ternyata belum mencukupi kebutuhan. Masih terdapat kekurangan beras hampir 43 ribu ton. Permintaan terbesar terdapat di Kodya Balikpapan dan Samarinda. Hal ini merupakan peluang pasar yang besar bagi kabupaten-kabupaten yang berada disekitarnya yang merupakan sentra produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Paser, Kutai, Bulungan dan Berau yang masih memiliki luas lahan yang belum dimanfaatkan terbesar, sekaligus menjadi tantangan bagi petani untuk lebih meningkatkan hasil usahatani.

Dampak Penghapusan Subsidi Pupuk Terhadap Tingkat Penerapan Teknologi dan Produktivitas Padi

Kebijakan penghapusan subsidi pupuk telah dicanangkan sejak tanggal 9 April 1998 berdasarkan SK. Menkeu RI NO.207/KMK.016/1998. Namun demikian, baru diumumkan secara tegas oleh pemerintah pada tanggal 2 Desember 1998. Selanjutnya, berdasarkan SK Menperindag No. 26/MPP/Kep/1/1999, tata niaga pupuk dibebaskan sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga produsen pupuk dan perusahaan swasta dapat berpartisipasi dalam pengadaan dan distribusi pupuk. Dengan kebijakan ini, diharapkan ketersediaan pupuk akan lebih terjamin dengan harga yang lebih kompetitif (Depkeu, 1998; Deperindag, 1999). Pada tanggal 14 Maret

Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Bulungan, Berau dan Kutai Kertanegara, 1996-2001

Kabupaten	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Pertumbuhan (%)
Bulungan							
- Luas panen (ha)	15644	14873	7962	15250	10285	9035	-10,40
- Produksi (ton)	46056	43616	22333	51499	32207	29110	-8,77
- Produktivitas (ton/ha)	2,94	2,93	2,80	3,38	3,13	3,22	1,84
Berau							
- Luas panen (ha)	1846	7968	5129	7960	8416	8765	36,55
- Produksi (ton)	5712	18234	12245	19959	21520	23613,7	32,82
- Produktivitas (ton/ha)	3,09	2,29	2,39	2,51	2,56	2,69	-2,73
Kutai KN							
- Luas panen (ha)	88213	88589	35760	47823	48320	42088	-13,76
- Produksi (ton)	263340	251971	125590	190879,5	188410	183564	-6,96
- Produktivitas (ton/ha)	2,99	2,84	3,51	3,99	3,90	4,36	7,84
Kalimantan Timur							
- Luas panen (ha)	157866	156758	61381	147333	138348	125463	-10,92
- Produksi (ton)	408969	411745	170256	409884	401955	366708	-4,59
- Produktivitas (ton/ha)	2,59	2,56	2,77	2,78	2,91	2,92	0,37

Sumber : BPS, 1996 s/d 2001. Kalimantan Timur Dalam Angka.

Tabel 2. Tingkat Penyediaan Konsumsi Beras di Provinsi Kalimantan Timur, 2000

Kabupaten	Jumlah penduduk (jiwa)	Produksi padi (ton)	Tersedia utk konsumsi (ton)	Kebutuhan (ton)	Surplus/defisit (ton)	% ketersediaan
Pasir	267.960	79.217	45.827	30.279	15.548	151,35
Kutai	807.812	214.605	124.149	91.283	32.866	136,00
Berau	117.458	22.391	12.953	13.273	-320	97,59
Bulungan	315.011	62.277	36.027	35.596	431	101,21
Balikpapan	406.833	198	115	45.972	-45.858	0,25
Samarinda	521.471	23.267	13.460	58.926	-45.466	22,84
Kalimantan Timur	2.436.545	401.955	232.531	275.329	-42.799	84,46

Sumber : BPS, 2000

Konversi gabah beras = 65 persen

Konsumsi per kapita = 113 kg/kapita/th

2001, pemerintah kembali mengatur tataniaga pupuk Urea berdasarkan SK Menperindag No. 93/MPP/Kep/3/2001. Penghapusan subsidi pupuk dimaksudkan agar tidak terjadi disparitas harga dalam dan luar negeri. Sedangkan pengaturan tataniaga pupuk dimaksudkan untuk menghapus monopoli pemasaran, sehingga pupuk dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau oleh petani (Deperindag, 2001).

Di Provinsi Kalimantan Timur, pengaruh kebijakan penghapusan subsidi pupuk terhadap tingkat penerapan teknologi pada awalnya cukup nyata. Indikator utama tingkat penerapan teknologi adalah penggunaan pupuk dan pestisida serta produktivitas tanaman. Petani melaporkan bahwa pada musim tanam 1998/1999, hampir seluruh petani tidak menggunakan pupuk KCl dan lebih dari 75 persen petani tidak menggunakan SP-36. Pada saat itu, pupuk KCl yang merupakan pupuk

impor tidak tersedia di kios-kios dan apabila ada di kios harganya sangat mahal (Rp 3000–Rp 4000/kg) sehingga tidak terjangkau oleh petani. Mahalnya harga KCl terutama disebabkan oleh tingginya kurs Dollar AS saat itu (\pm Rp 14.000/US\$). Petani yang masih menggunakan SP36 mengurangi dosis pemakaiannya.

Sejak musim tanam 2000/2001 sampai saat survei melakukan (MT 2001/2002), petani telah kembali menggunakan pupuk seperti sebelum penghapusan subsidi. Sebab, selain harga pupuk sudah mulai stabil juga mereka khawatir produktivitas tanamannya menurun.

Seperti terlihat pada Tabel 3, secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam hal pemakaian pupuk antara musim tanam 1997/1998 dengan 2001/2002. Perbedaan yang cukup nyata hanya terlihat pada penggunaan SP36, yang menurun rata-rata 33 persen, 50 persen, dan 33 persen berturut-turut di Kabupaten Bulungan, Berau, dan Kutai Kertanegara. Sedangkan dosis Urea dan KCl pada MT 2001/2002 masih tetap seperti MT 1997/1998 (sebelum penghapusan subsidi). Penurunan yang juga cukup nyata adalah dalam hal penggunaan pestisida di dua Kabupaten Bulungan dan Berau.

Penurunan penggunaan SP-36 di dua Kabupaten Bulungan dan Berau hanya menyebabkan turunnya produktivitas sebesar hampir 1

ku/ha, baik di Kabupaten Bulungan maupun Berau. Sedangkan di Kutai Kertanegara produktivitas masih meningkat 1 kuintal gabah/ha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan subsidi pupuk hanya menimbulkan gejolak pada tahun pertama kebijakan tersebut diluncurkan. Setelah harga pupuk stabil, petani kembali menggunakan pupuk seperti semula, sehingga tidak berdampak negatif terhadap produktivitas padi. Secara lebih rinci penggunaan masukan dan produktivitas untuk tanaman padi disajikan pada Tabel 3.

Dampak Penghapusan Subsidi Pupuk Terhadap Pendapatan Usahatani Padi

Hasil analisis usahatani sebelum adanya kebijakan subsidi dan setelah adanya kebijakan dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5. Analisis usahatani padi pada musim tanam (MT) 1997/1998 digunakan sebagai representasi dari kondisi sebelum penghapusan subsidi pupuk. Sedangkan analisis usahatani pada MT 2001/2002 digunakan sebagai representasi kondisi setelah penghapusan subsidi pupuk.

Sebelum penghapusan subsidi pupuk, penggunaan pupuk untuk tanaman padi di tiga kabupaten adalah seperti disajikan pada Tabel 3 dan 4. Dengan rata-rata harga pupuk di tingkat petani: Urea Rp 700/kg di Kabupaten Bulungan

Tabel 3. Tingkat Penggunaan Pupuk dan Pestisida untuk Usahatani Padi di Tiga Kabupaten Kalimantan Timur, MT 1997/98 dan MT 2001/2002

Sarana Produksi	Bulungan		Berau		Kutai Kertanegara	
	1997/98	2001/02	1997/98	2001/02	1997/98	2001/02
Benih (Kg)	42	46	50	45	48	50
Urea (Kg)	100	100	100	100	150	150
SP-36 (Kg)	75	50	100	50	150	100
KCL (Kg)	50	50	50	50	50	50
Pest cair (ltr)	2	1	2.5	1.5	1.5	1.5
Pest.padat (Kg)	3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Herbisida (Kg)	1	1	2	1	2	2
T. Kerja (HOK)	91	78	71	75	93	87
Produktivitas (t/ha)	2,35	2,26	2,62	2,54	3,12	3,25

Sumber: Data primer, diolah.

Dampak Kebijakan Penghapusan Subsidi Pupuk Terhadap Kinerja Usahatani dan Efektivitas Kebijakan Harga Dasar Gabah di Provinsi Kalimantan Timur (RR. Retno Widowati, Emilya, Hamsudin, dan Dewa K.S. Swastika)

Tabel 4. Analisis Usahatani Padi di Kabupaten Bulungan, Berau dan Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, MH 1997/1998

Komponen Biaya dan Pendapatan	Bulungan		Berau		Kutai Kertanegara	
	Fisik	Nilai	Fisik	Nilai	Fisik	Nilai
Benih	42	63.000	50	100.000	48	120.000
Pupuk	225	182.500	250	212.500	350	242.500
- Urea	100	70.000	100	70.000	150	82.500
- TSP/SP-36	75	67.500	100	95.000	150	112.500
- KCL	50	45.000	50	47.500	50	47.500
Pest/Herb	6	80.500	6	102.500	5	102.500
- Pest cair	2	50.000	2,5	37.500	1,5	30.000
- Pest. Padat	3	10.500	1,5	15.000	1,5	22.500
- Herbisida	1	20.000	2	50.000	2	50.000
Ten. Kerja (HOK)	91	1.365.000	71	1.065.000	93	1.395.000
Produksi	2.350	2.232.500	2.620	2.489.000	3.120	2.652.000
Pengeluaran		1.691.000		1.480.000		1.860.000
Pendapatan		541.500		1.009.000		792.000
B/C		0,32		0,68		0,43

Sumber: data primer, diolah.

Tabel 5. Analisis Usahatani Padi di Kabupaten Bulungan, Berau dan Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, MH 2001/2002

Komponen Biaya dan Pendapatan	Bulungan		Berau		Kutai Kertanegara	
	Fisik	Nilai	Fisik	Nilai	Fisik	Nilai
Benih	46	115.000	45	112.500	50	175.000
Pupuk	200	300.000	200	300.000	300	425.000
- Urea	100	120.000	100	120.000	150	165.000
- TSP/SP-36	50	90.000	50	90.000	100	170.000
- KCL	50	90.000	50	90.000	50	90.000
Pest/Herb	3,5	102.500	4	122.500	5	196.500
- Pest cair	1	30.000	1,5	45.000	1,5	67.500
- Pest. Padat	1,5	37.500	1,5	37.500	1,5	45.000
- Herbisida	1	35.000	1	40.000	2	84.000
Ten.Kerja (HOK)	78	1.560.000	75	1.500.000	87	1.740.000
Produksi	2.260	2.486.000	2.540	2.540.000	3.250	3.575.000
Pengeluaran		2.077.500		2.035.000		2.536.500
Pendapatan		408.500		505.000		1.038.500
B/C		0,20		0,25		0,41

Sumber: data primer, diolah.

dan Berau serta Rp 550/kg di Kutai Kertanegara; SP36 Rp 900/kg di Bulungan dan Rp 950/kg di Berau serta Rp 750/kg di Kutai Kertanegara; KCl Rp 900/kg di Bulungan dan Rp 950/kg di Berau dan Kutai Kertanegara, maka biaya pupuk yang

dikeluarkan untuk usahatani padi di tiga kabupaten adalah Rp 182.500, Rp 212.500, dan Rp 242.500 per ha berturut-turut di Kabupaten Bulungan, Berau, dan Kutai Kertanegara. Total biaya untuk usahatani padi di tiga lokasi contoh

adalah Rp 1.691.000, Rp 1.480.000, dan Rp 1.860.000 per ha berturut-turut di Kabupaten Bulungan, Berau dan Kutai Kertanegara.

Harga pupuk di Kabupaten Bulungan dan Berau ternyata lebih mahal dari pada di Kutai Kertanegara. Hal ini dapat dimaklumi, karena kedua kabupaten tersebut lebih terisolir dari pada Kutai Kertanegara. Tingginya harga pupuk di Kabupaten Bulungan dan Berau diduga disebabkan oleh tingginya biaya transportasi ke kabupaten ini. Berbeda dengan Kutai Kertanegara yang sangat dekat dengan Samarinda dengan fasilitas transportasi sangat baik.

Dengan produktivitas padi masing-masing 2,35 ton, 2,62 ton, dan 3,12 ton per ha, maka total penerimaan adalah: Rp 2.232.500, Rp 2.489.000, dan Rp 2.652.000 per ha, berturut-turut di Kabupaten Bulungan, Berau dan Kutai Kertanegara. Dengan demikian, maka keuntungan bersih dari usahatani padi adalah: Rp 541.500, Rp 1.009.000, dan Rp 792.000 per ha, dengan rasio B/C sebesar 0,32, 0,68, dan 0,43, berturut-turut di Kabupaten Bulungan, Berau dan Kutai Kertanegara. Secara lebih rinci, hasil analisis finansial usahatani padi sebelum penghapusan subsidi pupuk disajikan pada Tabel 4.

Setelah penghapusan subsidi pupuk, maka harga Urea di Kalimantan Timur adalah Rp 1.200/kg di Bulungan dan Berau, serta Rp 1.100/kg di Kutai Kertanegara. Harga SP-36 adalah Rp Rp 1.800/kg di Bulungan dan Berau, serta Rp 1.700/kg di Kutai Kertanegara. Sedangkan harga KCl di tiga kabupaten sama, yaitu Rp 1.800/kg. Seperti halnya sebelum penghapusan subsidi, maka setelah penghapusan subsidi pupuk, harga pupuk di dua Kabupaten Bulungan dan Berau juga lebih mahal dari pada di Kutai Kertanegara. Hal ini diduga disebabkan oleh tingginya biaya transportasi ke dua kabupaten ini.

Pada tingkat harga-harga pupuk seperti disebutkan di atas, maka biaya pupuk untuk usahatani padi adalah masing-masing Rp 300.000/ha di Kabupaten Bulungan dan Berau, dan Rp 425.000/ha di Kutai Kertanegara. Lebih tingginya biaya pupuk di Kutai Kertanegara, karena

penggunaan pupuk di kabupaten ini lebih tinggi dari pada dua kabupaten lainnya.

Total biaya produksi padi di tiga kabupaten contoh pada MH 2001/2002 adalah: Rp 2.077.500, Rp 2.035.000, dan Rp 2.035.000, dan Rp 2.536.500 per ha berturut-turut di Kabupaten Bulungan, Berau dan Kutai Kertanegara. Dengan produktivitas padi masing-masing 2,26 t/ha, 2,54 t/ha dan 3,25 t/ha, maka pendapatan bersih usahatani padi adalah: Rp 408.500, Rp 505.000, dan Rp 1.038.500 per ha per musim, dengan rasio B/C sebesar 0,20, 0,25, dan 0,41 berturut-turut di Kabupaten Bulungan, Berau, dan Kutai Kertanegara. Secara lebih rinci, hasil analisis usahatani padi MH 2001/2002 disajikan pada Tabel 5.

Seperti terlihat pada Tabel 4 dan 5, bahwa secara nominal pendapatan bersih dari usahatani padi pada MH 2001/2002 (setelah penghapusan subsidi) di dua Kabupaten Bulungan dan Berau ternyata lebih rendah dari pada MH 1997/1998 (sebelum penghapusan subsidi pupuk). Hanya di Kabupaten Kutai Kertanegara pendapatan nominal petani padi setelah penghapusan subsidi lebih tinggi dari pada sebelum penghapusan subsidi pupuk. Jika dicermati perimbangan pendapatan bersih dengan biaya yang dikeluarkan yang dicerminkan oleh rasio B/C, maka terlihat bahwa nilai B/C setelah penghapusan subsidi di tiga kabupaten lebih rendah dari pada sebelum penghapusan subsidi.

Pendapatan nominal belum cukup memberikan gambaran apakah pendapatan petani pada tahun tertentu lebih baik dari pada beberapa tahun sebelumnya. Sebab nilai nominal Rp 1.000 pada tahun ini lebih tinggi nilai riilnya dibandingkan dengan nominal Rp 1.000 setelah beberapa tahun berikutnya. Gittinger, (1982) menyebutkan bahwa "*a bird in hand is worth two in the bush*". Untuk membandingkan pendapatan pada tahun yang berbeda, maka diperlukan analisis kelayakan finansial jangka panjang. Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi nilai uang dalam tahun yang berbeda adalah menggunakan *discount factor*. Selain itu, nilai pendapatan riil pada tahun yang

Tabel 6. Dampak Penghapusan Subsidi Pupuk terhadap Pendapatan Petani Padi di Tiga Kabupaten Contoh di Kalimantan Timur (harga konstan 1996), 1997/98-2001/02

Kabupaten	Tahun	Pendapatan Nominal (Rp)	CPI Bahan makanan Kalimantan Timur (1996=100)	Pendapatan Riil (Rp)
Bulungan	1997/1998	451000	172.11	262041
	2001/2002	408500	239.83	171423
Berau	1997/1998	1009000	172.11	586253
	2001/2002	505000	239.83	211918
Kutai Kertanegara	1997/1998	792000	172.11	460171
	2001/2002	1038500	239.83	432708

Sumber: data primer, diolah.

berbeda juga dapat dibandingkan dengan menggunakan indeks harga sebagai deflator. Tabel 6 menyajikan hasil analisis dampak penghapusan subsidi pupuk terhadap pendapatan petani, dengan membandingkan pendapatan usahatani padi musim tanam 1997/1998 dengan musim tanam 2001/2002 di tiga kabupaten contoh, dengan menggunakan indeks harga konsumen (CPI) bahan makanan di Kalimantan Timur pada tingkat harga konstan 1996.

Seperti pada Tabel 6, bahwa untuk dua Kabupaten Bulungan dan Berau, baik nilai nominal maupun nilai riil pendapatan bersih usahatani padi tahun 2001/2002 lebih rendah dari pada 1997/1998. Hanya di Kabupaten Kutai Kertanegara pendapatan nominal petani padi 2001/2002 lebih tinggi dari pada 1997/1998.

Namun demikian, nilai riil pendapatan bersih petani padi di tiga kabupaten contoh tahun 2001/2002 lebih rendah dari pada tahun 1997/1998. Untuk Kabupaten Bulungan, nilai riil pendapatan tahun 2001/2002 hanya sekitar 65 persen dari pendapatan tahun 1997/1998. Dengan kata lain, penurunan pendapatan riil mencapai 35 persen. Lebih buruk lagi di Kabupaten Berau. Pendapatan riil tahun 2001/2002 hanya sekitar 36 persen dari pendapatan usahatani padi tahun 1997/1998, atau mengalami penurunan sekitar 64 persen dibandingkan dengan tahun 1997/1998. Di kabupaten Kutai Kertanegara, penurunan tersebut

hanya sekitar 6 persen. Ini berarti bahwa kebijakan penghapusan subsidi pupuk berdampak negatif terhadap pendapatan riil petani padi, dengan tingkat penurunan pendapatan riil yang berbeda antar kabupaten di Kalimantan Timur.

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Harga Dasar Gabah

Perkembangan harga gabah selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sebelum kenaikan harga dasar berdasarkan Inpres No. 1/1996; No. 2/1997, sampai dengan No. 12/1998, harga gabah di tingkat petani jauh di atas harga dasar. Hal ini sangat logis, karena Kalimantan Timur bukanlah daerah surplus beras. Produksi padi di Provinsi ini tidak mencukupi kebutuhan penduduknya, sehingga harus mendatangkan beras dari Pulau Jawa atau dari Sulawesi Selatan. Akibatnya, baik harga beras maupun harga gabah jauh di atas harga dasar. Ini berarti bahwa harga dasar gabah yang lebih sesuai diterapkan di pulau Jawa dan daerah sentra produksi lainnya di Indonesia, tidak sesuai untuk diterapkan di Kalimantan Timur. Karena harga di tingkat petani sudah jauh di atas harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan harga dasar gabah yang bertujuan untuk mencegah jatuhnya harga gabah di tingkat petani, tidak efektif untuk diterapkan di Kalimantan Timur.

Selama tahun 1998, telah terjadi empat kali kenaikan harga dasar gabah, yaitu pada bulan-bulan Januari, April, Juni, dan Desember 1998 (Tabel 7). Kenaikan harga dasar gabah yang dijadikan kompensasi dari kebijakan penghapusan subsidi pupuk, berdasarkan Inpres No. 32/1998, adalah kenaikan dari Rp 1.000/kg menjadi Rp 1.500/kg, dan berlaku mulai 1 Desember 1998. Kebijakan ini ternyata juga tidak cukup efektif untuk diterapkan di Kalimantan Timur. Harga dasar GKG ditetapkan Rp 1500/kg. Akan tetapi harga beli di tingkat petani hanya mampu naik dari Rp 950/kg menjadi Rp 1.000/kg. Baru tahun 2001 harga gabah di tingkat petani mencapai Rp 1.100/kg, seperti terlihat pada Tabel 7.

Meskipun Kalimantan Timur merupakan daerah defisit beras, ternyata kenaikan harga dasar yang cukup tinggi, dari Rp 1000/kg menjadi Rp 1500/kg, tidak dapat diimplementasikan di lapangan. Pedagang tidak mau membeli gabah petani pada tingkat harga dasar yang ditetapkan untuk Kalimantan Timur (Wilayah III). Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada juga tidak mampu membeli gabah petani, karena tidak mempunyai cukup modal untuk keperluan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan kenaikan harga dasar gabah dari Rp 1000/kg menjadi Rp 1500/kg GKG belum dapat diterapkan di Kalimantan Timur.

Akibatnya, sebagian petani menjual gabahnya dengan harga sekitar Rp 1100/kg (jauh dibawah harga dasar), dan sebagian lagi petani enggan menjual gabahnya dan lebih banyak menggunakan untuk konsumsi rumah tangga. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa dengan tingkat harga gabah Rp 1100/kg GKG, maka pendapatan riil usahatani padi ternyata menurun.

Untuk menghindari kerugian petani akibat kenaikan harga pupuk, maka perlu ada upaya untuk mengamankan pelaksanaan kebijakan harga dasar gabah di lapangan. Selama ini kenaikan harga dasar gabah selalu merupakan kebijakan yang sulit untuk diimplementasikan di lapangan. Petani senantiasa berada pada posisi tawar yang rendah dalam hal harga jual produknya. Harga jual gabah di tingkat petani lebih banyak ditentukan oleh pedagang. Petani hanya bersifat sebagai penerima harga.

Agar harga gabah yang diterima petani mendekati harga dasar, maka pemerintah pusat atau daerah perlu menyediakan anggaran khusus untuk membeli gabah petani pada harga dasar yang ditentukan, melalui KUD dan Dolog. Bagi pemerintah Kalimantan Timur yang PAD-nya cukup besar, hal ini sangat memungkinkan. Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah daerah Kalimantan Timur adalah menyisihkan sebagian PAD untuk mensubsidi pupuk bagi

Tabel 7. Perkembangan Harga Dasar Gabah dan Harga Tingkat Petani, 1996-2001

Tahun	Harga Dasar Gabah	Harga pembelian berdasarkan Inpres		Nomor Inpres	Tanggal berlaku	Harga di tingkat petani **)
		KUD	Non KUD			
1996	450	466	460	No.1/1996	07-09-96	600
1997	525	541	535	No.2/1997	24-01-97	800
1998: 1	600	616	610	No.7/1998	29-01-98	900
1998: 2	700	716	710	No.12/1998	01-04-98	900
1998: 3	1000	1016	1010	No.19/1998	01-06-98	950
1998: 4	1.500	1.519	1.510	No.32/1998	01-12-98	1000
1999	1.500	1.519	1.510	No.39/1999	01-01-00	1000
2000	1.500	1.519	-	No.8/2000	01-01-01	1100
2001	1.519	-	-	No.9/2001	01-01-02	1100

Sumber: Data 1996-1998: Ditjen Tan. Pangan dan Hortikultura, 1999.

Data 1999-2001: Dinas Pertanian Tanaman Pangan TK I Provinsi Kalimantan Timur, 2001

**): Data primer.

Dampak Kebijakan Penghapusan Subsidi Pupuk Terhadap Kinerja Usahatani dan Efektivitas Kebijakan Harga Dasar Gabah di Provinsi Kalimantan Timur (RR. Retno Widowati, Emilya, Hamsudin, dan Dewa K.S. Swastika)

petani di Kalimantan Timur. Hal ini dapat mengurangi beban biaya produksi bagi petani, sehingga dampak negatif dari penghapusan subsidi pupuk dapat ditekan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Kenaikan harga pupuk (akibat pencabutan subsidi) secara umum tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat penerapan teknologi usahatani padi. Dampak negatif hanya terlihat pada dosis penggunaan SP-36. Penurunan dosis penggunaan SP-36 hanya berdampak pada penurunan produktivitas padi sebesar 1 ku/ha di Kabupaten Bulungan dan Berau.
2. Kebijakan penghapusan subsidi pupuk yang disertai kenaikan harga dasar gabah berdampak negatif terhadap pendapatan riil petani. Dampak negatif ini terjadi karena belum efektifnya implementasi kebijakan kenaikan harga dasar gabah, sehingga kenaikan biaya produksi belum diimbangi dengan kenaikan harga jual gabah di tingkat petani.
3. Nilai riil pendapatan bersih usahatani padi tahun 2001/2002 menurun sekitar 35 persen untuk Kabupaten Bulungan, 64 persen untuk Berau, dan 6 persen untuk Kutai Kertanegara, dibandingkan dengan pendapatan riil tahun 1997/1998, pada harga konstan 1996. Ini berarti bahwa kebijakan penghapusan subsidi pupuk berdampak negatif terhadap pendapatan riil petani padi di Kalimantan Timur.
4. Harga dasar gabah yang lebih sesuai diterapkan di pulau Jawa dan daerah sentra produksi padi lainnya di Indonesia, tidak sesuai untuk diterapkan di Kalimantan Timur. Karena sebelum kebijakan Desember 1998 harga di tingkat petani sudah di atas harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan meningkatkan harga dasar gabah dari Rp 1.000/kg menjadi Rp 1.500/kg juga tidak efektif, sebab kenaikan yang terlalu tinggi (50%) tidak

dapat diimplementasikan di lapangan. Dengan kata lain, kebijakan harga dasar gabah yang bertujuan untuk mencegah jatuhnya harga gabah di tingkat petani, tidak efektif untuk diterapkan di Kalimantan Timur.

Implikasi Kebijakan

1. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur perlu mengupayakan tersedianya fasilitas kredit murah dengan prosedur administrasi yang mudah. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan petani dalam memperoleh sarana produksi (terutama pupuk dan pestisida).
2. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur harus melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap pelaksanaan kebijakan harga dasar gabah. Langkah ini dapat ditempuh dengan menyediakan dana bagi Dolog untuk melakukan pembelian gabah petani pada tingkat harga dasar, baik melalui KUD maupun dengan membentuk Tim Khusus Dolog. Dengan PAD Kalimantan Timur yang begitu besar, penyediaan dana ini sangat memungkinkan.
3. Alternatif kebijakan terburuk adalah menyisihkan sebagian anggaran daerah untuk memberi subsidi pupuk bagi petani di Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2002. Strategi Pembangunan Pertanian di Kalimantan Timur. Temu Koordinasi Teknologi Pertanian Kalimantan Timur, Samarinda 28 Nopember 2002. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2001. Kalimantan Timur Dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Departemen Keuangan, 1998. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 207/KMK.016/1998, Tentang Penghapusan Subsidi Pupuk untuk Sektor Pertanian. Jakarta.

- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 1999. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.26/MPM/Kep/1/1999, Tentang Tataniaga Pupuk. Jakarta.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 2001. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.93/MPP/Kep.3/3/2001, Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea untuk Sektor Pertanian. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 1998. Kebijakan Penghapusan Subsidi Pupuk dan Pemberian Insentif Usahatani Dalam Rangka Gema Palagung 2001. Jakarta.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur. 2001. Laporan Tahunan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bulungan. 2001. Laporan Tahunan. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bulungan. Tanjung Palas.
- Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. 2001. Laporan Tahunan. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Tanjung Redeb.
- Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kertanegara. 2001. Laporan Tahunan. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kertanegara. Tenggarong.
- Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Hortikultura, 1999. Vademekum Pemasaran 1990-1999. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Gittinger, J.P. 1982. Economic Analysis of Agricultural Projects. Second Edition. Johns Hopkins Univ. Press. Baltimore and London.
- Swastika, D.K.S., Sumaryanto, N. Ilham, dan A. Supriatna. 1999a. Respon Petani terhadap kebijakan penghapusan subsidi pupuk dan kenaikan harga dasar gabah *dalam* Analisis dan Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian Pasca Krisis Ekonomi. Monograph Series No. 20. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Swastika, D.K.S., N. Ilham, dan A. Supriatna. 1999b. Pengadaan dan distribusi pupuk pasca deregulasi kebijakan desember 1998 *dalam* Analisis dan Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian Pasca Krisis Ekonomi. Monograph Series No. 20. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.